



PUTUSAN

Nomor 330/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANSAR YAMIN**
Tempat lahir : Bulukumba
Umur / Tgl. Lahir : 52 tahun/05 Pebruari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jala. Lagoa Terusan Gg III B II/2 RT.7 RW.2 Iurahan
Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.Direktu Utama PT Nagasaksi Trans
Segara
Pendidikan : SMA
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat hukum: SITTI RABIAH,SH dan SATRIA,SH.,MH, Advokat /Pengacara dan Penasihat Hkum pada Kantor YLBH KEADAILAN JAYA, berkedudukan di Jalan KH.Soleh Ali No.9 RT.004 /RW.014,Kelurahan Sukasari,Kecamatan Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

- Bahwa ia Terdakwa ANSAR YAMIN sebagai Direktur Utama PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA dan sebagai Presiden Komisaris PT. TRANS MARINE SEJATI
bersama-sama dengan PUJI RAHAYU sebagai marketing PT DWIKARSA serta MOH MAKI alias MAKKI alias ATENG alias MARTIN sebagai karyawan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAGASAKTI TRANS SEGARA dan sebagai Direktur PT. TRANS MARINE SEJATI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA Jl. Gadang Terusan No. 12 RT. 10 RW. 03, Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Mall Artha Gading, Jl Artha Gading, Kota, Jakarta Utara maupun ITC Cempaka Mas Mega Grosir Lt. 7 No 12 D, Jl. Letjend Suprpto Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANSAR YAMIN adalah Direktur Utama PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA oleh Notaris Abdul Salam, SH Nomor 04 Tanggal 11 Oktober 2017.
- Bahwa Terdakwa ANSAR YAMIN juga menjadi Presiden Komisaris PT. TRANS MARINE SEJATI berdasarkan Akta pendirian perusahaan oleh notaris NANING RETNOSARI, SH, nomor 70 tanggal 18 Pebruari 2016 dan Akta Notaris ABDUL SALAM, SH nomor 04 tanggal 19 Desember 2017 serta pengesahan akte-nya oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan nomor AHU-0027446.AH.01.02 Tahun 2017.
- Bahwa kantor operasional PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA terletak di Jl. Gadang Terusan No. 12 RT. 10 RW. 03, Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Perusahaan PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA dan PT. TRANS MARINE SEJATI terdaftar di alamat yang sama yaitu ITC Cempaka Mas Mega Grosir Lt. 7 no. 12 D Jl. Letjend Suprpto Kemayoran Jakarta Pusat. PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak per tanggal 19 Maret 2013. Sedangkan PT. TRANS MARINE diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak per tanggal 22 Januari 2018.

Hal. 2 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA memiliki sertifikat elektronik sejak tanggal 27 Agustus 2015, kemudian YOHANES AGUS SANTOSA selaku

Direktur PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA meminta permohonan perpanjangan sertifikat elektronik melalui surat nomor 001/PJK.NTS/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

- Bahwa YOHANES AGUS SANTOSA selaku Direktur PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA menandatangani Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai / SPT masa PPN dan menyampaikan ke Kantor Pajak Pratama mulai tahun 2016 s/d 2018. YOHANES AGUS SANTOSA selaku Direktur PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA telah menerbitkan faktur pajak atas nama PT NAGASAKTI TRANS SEGARA.

- Bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA, selama kurun masa Januari 2016 s/d Juli 2018 telah menerbitkan faktur pajak sebagai berikut :

| No | Masa | Jumlah faktur | PPN |
|----|------------------------|---------------|--------------|
| 1 | Masa Jan s.d Des 2016 | 2 faktur | 139,000,000 |
| 2 | Masa Jan s.d Des 2017 | 90 faktur | 2,957,810,80 |
| | | | 8 |
| 3 | Masa Jan s.d Juli 2018 | 77 faktur | 3,297,084,62 |
| | | | 6 |
| | Jumlah | 169 faktur | 6,393,895,43 |
| | | | 4 |

- Bahwa PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA selama kurun waktu masa Januari 2016 s/d Juli 2018 telah mengkreditkan faktur pajak sebagai berikut :

| No | Tahun | Jumlah faktur | Jumlah PPN |
|----|-------|---------------|---------------|
| 1 | 2016 | 1 | 158.884.840 |
| 2 | 2017 | 103 | 2.997.365.633 |
| 3 | 2018 | 83 | 2.478.367.400 |
| | | 187 | 5.634.617.873 |

- Bahwa Terdakwa ANSAR YAMIN selaku Direktur PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA meminta MOH MAKI yang tidak ada dalam struktur perusahaan di PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA untuk mengurus perusahaan tersebut, sehingga MOH MAKI mempunyai kewenangan seperti layaknya pengurus di PT NAGASAKTI TRANS SEGARA.

Hal. 3 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANSAR YAMIN memberikan kewenangan secara lisan kepada MOH MAKI untuk mengurus perusahaan, dengan demikian MOH MAKI dapat memberikan perintah ke staf PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA seperti kepada NADIA FEBRIYANTI atau SURJADI SUTAMI alias YUSTINUS untuk melakukan penerbitan faktur pajak.

- Bahwa Terdakwa ANSAR YAMIN kenal dengan PUJI RAHAYU sejak tahun 2010, karena pernah menjadi staf di perusahaan milik HENDRA yang bergerak di bidang usaha distributor solar Pertamina dan ketika Terdakwa ANSAR YAMIN bertemu dengan PUJI RAHAYU pernah mengatakan kepada PUJI RAHAYU bahwa perusahaan mempunyai kelebihan faktur, kalau sewaktu-waktu membutuhkan faktur miliknya.

Dan pada tahun 2017 AYU KOMALA DEWI sebagai konsultan pajak menanyakan kepada PUJI RAHAYU bahwa ada perusahaan yang kurang bayar, apakah ada kenalan yang punya kelebihan faktur. Kemudian PUJI RAHAYU menghubungi Terdakwa ANSAR YAMIN karena Terdakwa ANSAR YAMIN pernah mengatakan bahwa perusahaannya punya kelebihan faktur.

Bahwa AYU KOMALA DEWI membutuhkan faktur pajak untuk beberapa perusahaan yaitu : CV. TM ENGINEERING, PT. DUTA ANUGRINDO BERSAMA, PT. PN KEMBANG SENTOSA BERSAMA dan PT. BAHARI KUSUMA JAYA, dan PUJI RAHAYU memberitahukan kepada Terdakwa ANSAR YAMIN bahwa AYU KOMALA DEWI membutuhkan faktur yang ada pada Terdakwa ANSAR YAMIN, kemudian PUJI RAHAYU yang berperan sebagai perantara penjualan faktur pajak dari Terdakwa ANSAR YAMIN kepada AYU KOMALA DEWI.

- Bahwa kemudian AYU KOMALA DEWI memesan faktur pajak kepada PUJI RAHAYU untuk beberapa perusahaan yaitu CV. TM ENGINEERING, PT. DUTA ANUGRINDO BERSAMA, PT. PN KEMBANG SENTOSA BERSAMA dan PT. BAHARI KUSUMA JAYA. Keempat perusahaan tersebut memesan faktur pajak melalui AYU KOMALA DEWI karena AYU KOMALA DEWI adalah orang yang mengurus pajak bagi perusahaan tersebut. Selain dari 4 (empat) perusahaan tersebut, ada lagi perusahaan yang pesan faktur pajak langsung ke PUJI RAHAYU yaitu PT. BANGUN PUTRA SEJAHTERA. Untuk PT. BANGUN PUTRA SEJAHTERA dipesan oleh TAMJIS SODIKIN dengan cara telepon langsung kepada PUJI RAHAYU dengan menyebutkan jumlah PPN yang diminta. Setelah itu PUJI RAHAYU meneruskan pesanan dari AYU KOMALA DEWI DAN TAMJIS

Hal. 4 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODIKIN kepada Terdakwa ANSAR YAMIN atau NADIA FEBRIYANTI staf PT NAGASAKTI TRANS SEGARA.

Bahwa PUJI RAHAYU melakukan pemesanan faktur pajak kepada Terdakwa ANSAR YAMIN dengan cara yaitu :

AYU KOMALA DEWI mengirim pesan kepada PUJI RAHAYU melalui aplikasi whatsapp. Isi pesan menyebutkan nama perusahaan (dengan singkat / inisial) dan nilai PPN. Selanjutnya pesan dari AYU KOMALA DEWI diforward oleh PUJI RAHAYU kepada NADIA FEBRIYANTI staf Terdakwa ANSAR YAMIN.

NADIA FEBRIYANTI sudah mengetahui inisial perusahaan tersebut, karena sebelumnya PUJI RAHAYU sudah memforward foto kartu NPWP perusahaan-perusahaan yang dimaksud.

Setelah menerima pesanan dari PUJI RAHAYU maka Terdakwa ANSAR YAMIN meminta karyawan PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA yaitu NADIA FEBRIYANTI, SURJADI SUTAMI alias YUSTINUS, YOHANES AGUS SANTOSA dan MOH MAKI untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya beserta dengan kelengkapannya, sesuai dengan whatsapp dari PUJI RAHAYU.

Bahwa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA diterbitkan atas nama Direktornya YOHANES AGUS SANTOSA dan kelengkapannya berupa invoice ditandatangani oleh MOH MAKI maupun SURJADI SUTAMI alias YUSTINUS.

Bahwa faktur pajak PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan Terdakwa ANSAR YAMIN tersebut adalah berdasarkan pesanan PUJI RAHAYU yang sudah selesai dibuat, dikirim ke alamat PUJI RAHAYU dalam satu amplop. PUJI RAHAYU tidak membuka ataupun memeriksa isinya, selanjutnya PUJI RAHAYU menyerahkan amplop itu kepada AYU KOMALA DEWI.

- Bahwa harga faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA oleh Terdakwa ANSAR YAMIN dijual 60% dari nilai PPN dan PUJI RAHAYU menyerahkan uang hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada Terdakwa ANSAR YAMIN sebesar 45% dari nilai PPN yang dibuat. Sedangkan PUJI RAHAYU memperoleh fee sebesar 15% sebagai jasa perantara. Bahwa PUJI RAHAYU menyerahkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang

Hal. 5 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dari PT NAGASAKTI TRANS SEGARA kepada beberapa perusahaan pengguna yaitu

| Nama Pengguna | Harga | Nilai PPN 2017 | Nilai PPN 2018 |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| PT. DUTA ANUGRINDONUSA | 60% | 77.272.800 | |
| PT. BAHARI KUSUMA JAYA | 60% | 397.900.00 | 686.101.2 |
| | | 0 | 96 |
| PT. PELAYARAN NASIONAL | 60% | | 189.090.8 |
| KEMBANG SENTOSA B | | | 00 |
| CV. TM ENGINEERING | 60% | | 50.036.35 |
| | | | 2 |
| PT. BANGUN PUTERA S | 60% | 77.272.800 | 75.000.00 |
| | | | 0 |

- Bahwa PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA tidak pernah bertransaksi apapun dengan PT. DUTA ANUGRINDONUSA dan tidak pernah melakukan penyerahan barang berupa solar kapal sebanyak 100.000 liter, karena usaha dari PT. DUTA ANUGRINDONUSA tidak berhubungan dengan kapal. Transaksi antara PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA dengan PT. DUTA ANUGRINDONUSA hanya faktur pajaknya saja. PUJI RAHAYU melakukan pengiriman faktur pajak via kurir ke alamat PT. DUTA ANUGRINDONUSA di Ruka Milan Anenue di Telaga Golf Depok. Pembayaran atas pemesanan faktur pajak PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PUJI RAHAYU adalah melalui kas tunai dibayarkan di kantor PUJI RAHAYU di Enggano Tanjung Priok.
- Bahwa PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA tidak pernah bertransaksi apapun dengan PT. BAHARI KUSUMA JAYA dan tidak pernah melakukan penyerahan barang. Transaksi antara PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA dengan PT. BAHARI KUSUMA JAYA hanya dokumen saja berupa faktur pajak dan invoice. PUJI RAHAYU melakukan pengiriman faktur pajak via kurir ke alamat PT. BAHARI KUSUMA JAYA di Ganggeng Tanjung Priok. Pembayaran atas pemesanan faktur pajak PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PUJI RAHAYU adalah melalui kas tunai dibayarkan di kantor PUJI RAHAYU di Enggano Tanjung Priok.
- Bahwa Terdakwa ANSAR YAMIN telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai pesanan dari PUJI RAHAYU, kemudian faktur pajak tersebut diserahkan oleh PUJI RAHAYU kepada

Hal. 6 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AYU KOMALA SARI untuk dipergunakan oleh PT. BAHARI KUSUMA JAYA sebagai faktur pajak masukan yaitu sebagai berikut :

Tahun 2017 :

| NO | NO. FAKTUR | TGL FKT | DPP | PPN |
|----|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | 010.019-17.90707447 | 02/11/2017 | 324.250.000 | 32.425.00 |
| 2 | 010.019-17.90707448 | 05/11/2017 | 259.400.000 | 25.940.00 |
| 3 | 010.019-17.90707449 | 12/11/2017 | 194.700.000 | 19.470.00 |
| 4 | 010.019-17.90707450 | 20/11/2017 | 194.700.000 | 19.470.00 |
| 5 | 010.019-17.90707451 | 28/11/2017 | 390.000.000 | 39.000.00 |
| 6 | 010.019-17.90707452 | 23/11/2017 | 357.500.000 | 35.750 |
| 7 | 010.019-17.90707453 | 29/11/2017 | 273.000.000 | 27.300.00 |
| 8 | 010.019-17.90707458 | 11/12/2017 | 607.500.000 | 60.750.00 |
| | | | | |
| 9 | 010.019-17.90707459 | 15/12/2017 | 782.000.000 | 78.200.00 |
| 10 | 010,019-17.90707460 | 21/12/2017 | 595.950.000 | 59.595.00 |
| | | | JUMLAH | 397.900.0 |

Tahun 2018

| NO | NO. FAKTUR | TGL FKT | DPP | PPN |
|----|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | 010002-18.44184431 | 02/11/2018 | 711.000.000 | 71.100.00 |
| 2 | 010002-18.44184432 | 05/11/2018 | 750.500.000 | 75.050.00 |
| 3 | 010 002-18.44184433 | 12/11/2018 | 702.000.000 | 70.200.00 |
| 4 | 010.002-18.44184540 | 20/11/2018 | 750.000.000 | 75.000.00 |
| 5 | 010 002-18.44184541 | 28/11/2018 | 262.500.000 | 26.250.00 |
| 6 | 010.002-18.44184543 | 23/11/2018 | 518.000.000 | 51.800.00 |
| 7 | 010.002-18.44184558 | 29/11/2018 | 100.259.066 | 10.025.90 |
| 8 | 010.002-18.44184565 | 11/12/2018 | 726.700.000 | 72.670.00 |
| 9 | 010.002-18.44184570 | 15/12/2018 | 965.454.000 | 96.545.40 |
| 10 | 010.002-18.44184571 | 21/12/2018 | 869.999.900 | 86.999.99 |
| 11 | 010.003-18.49503431 | | 504.600.000 | 50.460.00 |
| | | | JUMLAH | 686.101.2 |

Bahwa Terdakwa ANSAR YAMIN juga telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai pesanan dari PUJI RAHAYU, kemudian faktur pajak tersebut diserahkan oleh PUJI RAHAYU kepada saksi AYU

Hal. 7 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMALA SARI untuk dipergunakan oleh PT DUTA ANUGRINDONUSA sebagai faktur pajak masukan yaitu sebagai berikut :

Tahun 2017 :

| NO | NO. FAKTUR | TGL FKT | DPP | PPN |
|----|---------------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 010.019-17.90707471 | 30/12/2017 | 772.728.000 | 77.272.800 |
| | | | JUMLAH | 77.272.800 |

Bahwa Terdakwa ANSAR YAMIN juga telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai pesanan dari PUJI RAHAYU, kemudian faktur pajak tersebut diserahkan oleh PUJI RAHAYU kepada saksi AYU KOMALA SARI untuk dipergunakan oleh CV TM ENGINEERING sebagai faktur pajak masukan yaitu sebagai berikut :

Tahun 2018 :

| NO | NO. FAKTUR | TGL FKT | DPP | PPN |
|----|---------------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 010.002-18.51974546 | 28/02/2018 | 500.363.520 | 50.036.352 |
| | | | JUMLAH | 50.036.352 |

Bahwa Terdakwa ANSAR YAMIN juga telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai pesanan dari PUJI RAHAYU, kemudian faktur pajak tersebut diserahkan oleh PUJI RAHAYU kepada saksi AYU KOMALA SARI untuk dipergunakan oleh PT. PELAYARAN NASIONAL KEMBANG SENTOSA BERSAMA sebagai faktur pajak masukan yaitu sebagai berikut :

Tahun 2018 :

| NO | NO. FAKTUR | TGL FKT | DPP | PPN |
|----|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 010.002-18.44184438 | 16/01/2018 | 745.750.000 | 74.575.000 |
| 2 | 010.002-1844184439 | 17/01/2018 | 745.750.000 | 74.575.000 |
| 3 | 010.002-18.44184539 | 19/02/2018 | 225.000.000 | 22.500.000 |
| 4 | 010.002-18.44184560 | 19/03/2018 | 174.408.000 | 17.440.800 |
| | | | JUMLAH | 189.090.800 |

Bahwa Terdakwa ANSAR YAMIN juga telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai pesanan dari PUJI RAHAYU, kemudian faktur pajak tersebut diserahkan oleh PUJI RAHAYU kepada saksi TAMJIS SODIKIN untuk dipergunakan oleh PT BANGUN PUTRA SEJAHTERA sebagai faktur pajak masukan yaitu sebagai berikut :

Tahun 2017 :

| NO | NO. FAKTUR | TGL FKT | DPP | PPN |
|----|------------|---------|-----|-----|
|----|------------|---------|-----|-----|

Hal. 8 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|---------------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 010.002-18.44184438 | 16/01/2018 | 772.728.000 | 77.272.800 |
| | | | JUMLAH | 77.272.800 |

Tahun 2018 :

| NO | NO. FAKTUR | TGL FKT | DPP | PPN |
|----|---------------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 010.002-18.44184438 | 16/01/2018 | 750.000.000 | 75.000.000 |
| | | | JUMLAH | 75.000.000 |

Terdakwa ANSAR YAMIN menerima pembayaran atas pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PUJI RAHAYU secara transfer dari rekening PUJI RAHAYU ke rekening Terdakwa di Bank BCA Nomor 4141637317 yaitu :

1. Tanggal 27/03 sebesar Rp. 75.000.000,-
2. Tanggal 28/03 sebesar Rp. 40.000.000,-
3. Tanggal 23/04/ sebesar Rp. 45.061.518,-
4. Tanggal 30/04/ sebesar Rp. 17.500.000,-

Selain itu PUJI RAHAYU juga melakukan pembayaran secara transfer ke rekening PT. Nagasaki Trans Segara Bank Mandiri Nomor rekening 1230003389899 antara lain yaitu :

1. Tanggal 28/05/2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
2. Tanggal 30/05/2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
3. Tanggal 31/05/2018 sebesar Rp. 25.000.000,-

- Rekapitulasi faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dikreditkan atau digunakan oleh perusahaan pengguna adalah sebagai berikut :

| No | Wajib Pajak Pengguna | NPWP | Tahun | Lb r | PPN |
|----|----------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------------------------|
| 1 | CV. TM ENGINEERING | 31.796.563 .0-412.000 | 2018 | 1 | 50.036.352 |
| 2 | PT. BAHARI KUSUMA JAYA | 70.041.941 .9-048.000 | 2017 2018 | 10 11 | 397.900.000 686.101.296 |
| 3 | PT. BANGUN PUTRA SEJAHTERA | 02.665.452 .5-411.000 | 2017 2018 | 2 1 | 77.272.800 75.000.000 |
| 4 | PT. DUTA ANUGRINDO NUSA | 01.328.080 .5-018.000 | 2017 | 1 | 77.272.800 |
| 5 | PT. PELAYARAN | 01.585.00 0.1- | 2018 | 4 | 189.090.800 |

Hal. 9 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|---|---------|--|--------|---------------|
| | NASIONAL KEMBANG SENTOSA BERSAMA | 731.000 | | | |
| | Jumlah | | | 3 0 | 1.552.674.048 |

Bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa ANSAR YAMIN adalah senilai faktur pajak yang diterbitkan oleh Terdakwa ANSAR YAMIN kemudian faktur pajak tersebut dikreditkan atau digunakan oleh para pengguna faktur pajak yaitu sebesar Rp. 1.552.674.048,- (Satu milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah), sebagaimana perhitungan kerugian pada pendapatan negara dari Ahli Direktorat Jenderal Pajak.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa ANSAR YAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANSAR YAMIN selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan.

Hal. 10 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



c. Membayar denda sebesar 2 x Rp. 1.552.674.048,- (Satu milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) = Rp. 3.105.348.096,- (tiga milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.

Uang titipan sebesar Rp. 953.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda (sebagaimana berita acara penitipan uang pembayaran pidana) tanggal 6 Mei 2019).

d. Menyatakan barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

e. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Pledoi / Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasehat Hukum Terdakwa

a. Menyatakan Terdakwa ANSAR YAMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

b. Membebaskan Terdakwa ANSAR YAMIN dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

c. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat.

d. Membebaskan Terdakwa ANSAR YAMIN dari pembayaran pajak senilai Rp. 1.552.674.048,- (Satu milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) karena Terdakwa ANSAR YAMIN sudah membayar lunas pada tanggal 6 Mei 2019.

e. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Terdakwa :

Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sebagai kepala keluarga dan mempunyai tanggungan anak dan istri yang harus menanggung beban biaya hidup keluarga.

4.Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 702/Pid.Sus/2019/PNJkt.Utr tanggal 5 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ANSAR YAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perpajakan”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANSAR YAMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp3.105.348.096.,(tiga milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu Sembilan puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar sesuai putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian akan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai hanta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;

Uang titipan sebesar Rp.953.000.000.- (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda (sebagaimana berita acara penitipan uang pembayaran pidana) tanggal 6 Mei 2019;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

| No | No. SP SITA | JENIS BARANG BUKTI | | |
|----|---|--|--|-------|
| 1. | | Penetapan Pengadilan Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Slt. Tanggal | | |
| | PRIN- 260.SITA/PJ.052/2018 tanggal 10 Oktober 2018 | No | Rincian | Ket |
| | | 1 | Fotokopi KTP atas Nama AYU ANDIANA, ASEP JAMALUDDIN, AGUS NURWANSYAH, BADARUDDIN A.P | 1 set |
| | | 2 | Akta Notaris NANING RETNOSARI, | 1 set |

Hal. 12 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



| | | | |
|--|----|--|----------|
| | | S.H Nomor 70 tanggal 18 Februari 2016 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Trans Marine Sejati | |
| | 3 | Akta Notaris KURNIAWAN, S.H, Mkn Nomor 208 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Trans Marine Sejati | 1 set |
| | 4 | Akta Notaris ABDUL SALAM, S.H. Nomor 4 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Trans Marine Sejati | 1 set |
| | 5 | Keputusan Menkumham Nomor AHU-0010557.AH.01.01. TAHUN 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT PT Trans marine Sejati | 1 lembar |
| | 6 | Keputusan Menkumham Nomor AHU-0007828.AH.01.02. TAHUN 2017 tanggal 04 April 2017 tentang Persetujuan Perubahan AD PT PT Trans Marine Sejati | 3 lembar |
| | 7 | Keputusan Menkumham Nomor AHU-0027446.AH.01.02. TAHUN 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Persetujuan Perubahan AD PT PT Trans Marine Sejati | 3 lembar |
| | 8 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 132/ 24.1PK.7/31.71.03/-1.824.27/e/2017 tanggal 3 November 2017 | 1 lembar |
| | 9 | Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 1666/24.3PT.7/31.71/-1.824.27/e/2017 tanggal 30 November 2017 | 1 lembar |
| | 10 | Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor | 1 lembar |

Hal. 13 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|----|--|----------|
| | | 177/24.3PT.7/31.75/-1.824.27/e/2016 tanggal 18 April 2016 | |
| | 11 | Surat Keterangan Domisili Perusahaan Kelurahan Sumur Batu a.n PT TRANS MARINE SEJATI tanggal 29 Desember 2017 | 1 lembar |
| | 12 | Surat Keterangan Domisili Perusahaan Kelurahan Sungai Bambu a.n PT TRANS MARINE SEJATI tanggal 13 Juli 2017 | 1 lembar |
| | 13 | Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT TRANS MARINE SEJATI nomor S- 22PKP/WPJ.06/KP.0503/2018 tgl 22 Januari 2018 | 1 lembar |
| | 14 | Surat Keterangan Terdaftar S- 4879KT/WPJ.21/KP.0803/2017 tanggal 29 Mei 2017 KPP Pratama Jakarta Sunter | 1 lembar |
| | 15 | Surat Keterangan Terdaftar S- 8185KT/WPJ.06/KP.0503/2017 tanggal 5 Desember 2017 KPP Pratama Jakarta Kemayoran | 1 lembar |
| | 16 | Fotokopi Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi Nomor S- 10/PPN.AK/WPJ.06/KP.0503/2018 tanggal 24 Januari 2018 | 1 lembar |
| | 17 | Fotokopi E- Nofa elektronik Nomor seri faktur pajak 2018 untuk PT TRANS MARINE SEJATI NPWP 75.713.134.7-003.000 dan fotokopi E FIN | 3 lembar |
| | 18 | Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-18.60976608 tanggal 31 Januari 2018 | 1 lembar |
| | 19 | Fotokopi screenshot transaksi Bank Mandiri dari rekening 9000026678020 ke rekening LINDA | 1 lembar |

Hal. 14 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---|--|--|-------------------------|
| | | | JOAN MAUREEN MOLLE nomor 1200007514701 | |
| | | 20 | Laptop Merk Lenovo Warna Hitam | 1 buah |
| | | 21 | Print Out percakapan aplikasi WA | 16 lembar |
| | | 22 | Fotokopi Laporan Pajak Keluaran dan Masukan bulan Januari dan Februari 2018 | 2 lembar |
| 2. | | Penetapan Pengadilan Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Slt. Tanggal | | |
| | PRIN- 264.SITA/PJ.052/2018 tanggal 22 Oktober 2018 | No | Rincian | Keterangan |
| | | 1 | Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama PT NAGASAKTI TRANS SEGARA dari Perhimpunan Penghuni ITC Cempaka Mas, tertanggal 14 Maret 2017 | 3 (tiga) lembar |
| | | 2 | Fotocopy Laporan Keuangan dan Laporan Pembelian atas nama PT NAGASAKTI TRANS SEGARA | 8 (delapan) lembar |
| | | 3 | Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT NAGASAKTI TRANS SEGARA | 1 (satu) lembar |
| | | 4 | Fotocopy Faktur Pajak, invoice, receipt for bunkers | 17 (tujuh belas) set |
| | | 5 | Fotocopy Faktur Pajak | 11 (sebelas) lembar |
| | | 6 | Fotocopy invoice | 6 (enam) lembar |
| | | 7 | Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT NAGASAKTI TRANS SEGARA, Nomor Rekening: 123-00-0338989-9 | 1 (satu) set |
| | | 8 | Fotocopy tulisan tangan perhitungan Faktur | 1 (satu) lembar |
| | | 9 | Fotocopy SPT Masa PPN masa Oktober 2017 | 4 (empat) lembar |
| | | 10 | Fotocopy SPT Masa PPN masa Pebruari 2018 | 6 (enam) lembar |
| 3. | | Penetapan Pengadilan Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Slt. | | |

Hal. 15 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---|--|---|-----------------|
| | PRIN- 266.SITA/PJ.052/2018 tanggal 23 Oktober 2018 | Tanggal | | |
| | | No | Rincian | Keterangan |
| | | 1 | Fotokopi Faktur Pajak, invoice dan receipt for bunkers atas transaksi dengan PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA | 48 lembar |
| | | 2 | Print Screen transaksi Bank Mandiri dari rekening AYU KOMALA DEWI No. rekening 1570002882703 ke rekening PUJI RAHAYU NO. Rekening 1010004196638 | 1 lembar |
| | | 3 | Fotokopi SPT masa PPN Pembetulan atas nama PT BAHARI KUSUMA JAYA | 7 (tujuh) set |
| 4. | | Penetapan Pengadilan Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Slt. Tanggal | | |
| | PRIN- 269.SITA/PJ.052/2018 tanggal 23 Oktober 2018 | Tanggal | | |
| | | No | Rincian | Keterangan |
| | | 1 | Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan a.n PT DUTA ANUGRINDONUSA | 1 (satu) set |
| | | 2 | Fotokopi Faktur Pajak No.010.019-17.90707471 tanggal 30 Desember 2017 | 1 (satu) lembar |
| | | 3 | Fotokopi Bukti Penerimaan Negara PT. DUTA ANUGRINDONUSA TANGGAL 30 Agustus 2018 senilai Rp. 77.272.800,- | 1 (satu) lembar |
| 5. | | Penetapan Pengadilan Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Slt. Tanggal | | |
| | PRIN- 271.SITA/PJ.052/2018 tanggal 23 Oktober 2018 | Tanggal | | |
| | | No | Rincian | Keterangan |
| | | 1 | Fotokopi faktur pajak nomor 010.002-18.44184447 tgl. 30/01/2018 dan lampirannya | 3 lembar |
| | | 2 | Fotokopi faktur pajak nomor 010.002-18.51974537 tgl 05/02/2018 dan lampirannya | 2 lembar |
| | | 3 | Fotokopi faktur pajak nomor | 2 lembar |

Hal. 16 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



| | | 010.002-18.51974538 tgl 12/02/2018 dan lampirannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------|---------|------------|---|---|----------|---|--|----------|---|---|----------|---|---|----------|---|---------------------|----------|--|
| | | 4 Fotokopi faktur pajak nomor 010.002-18.51974561 tgl 26/03/2018 dan lampirannya | 3 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 Fotokopi faktur pajak nomor 010.002-18.51974562 tgl 29/03/2018 dan lampirannya | 3 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 Fotokopi faktur pajak nomor 010.002-18.51974573 tgl 30/04/2018 dan lampirannya | 3 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 Fotokopi faktur pajak nomor 010.002-18.51974572 tgl 27/04/2018 dan lampirannya | 3 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 Fotokopi faktur pajak nomor 010.003-18.49503419 tgl 21/05/2018 dan lampirannya | 2 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 Fotokopi faktur pajak nomor 010.003-18.49503420 tgl 23/05/2018 dan lampirannya | 2 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 Screenshot Aplikasi Whatsapp dengan PUJI RAHAYU | 3 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 Screenshot Email dikin67@ymail.com | 1 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Penetapan Pengadilan Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Slt. Tanggal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIN- 279.SITA/PJ.052/2018 tanggal 25 Oktober 2018 | <table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Fotokopi Faktur Pajak No.010.002.18.51974539</td><td>1 lembar</td></tr><tr><td>2</td><td>Fotokopi Invoice No. 173/INV- NTS/II-2018</td><td>1 lembar</td></tr><tr><td>3</td><td>Fotokopi Faktur Pajak No.010.002.18.51974560</td><td>1 lembar</td></tr><tr><td>4</td><td>Fotokopi Invoice No. 202/INV- NTS/III-2018</td><td>1 lembar</td></tr><tr><td>5</td><td>Receipt For Bunkers</td><td>1 lembar</td></tr></table> | No | Rincian | Keterangan | 1 | Fotokopi Faktur Pajak No.010.002.18.51974539 | 1 lembar | 2 | Fotokopi Invoice No. 173/INV- NTS/II-2018 | 1 lembar | 3 | Fotokopi Faktur Pajak No.010.002.18.51974560 | 1 lembar | 4 | Fotokopi Invoice No. 202/INV- NTS/III-2018 | 1 lembar | 5 | Receipt For Bunkers | 1 lembar | |
| No | Rincian | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fotokopi Faktur Pajak No.010.002.18.51974539 | 1 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fotokopi Invoice No. 173/INV- NTS/II-2018 | 1 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fotokopi Faktur Pajak No.010.002.18.51974560 | 1 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Fotokopi Invoice No. 202/INV- NTS/III-2018 | 1 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Receipt For Bunkers | 1 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Penetapan Pengadilan Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Slt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | Tanggal | | |
|----|---|--|--|------------|
| | | No | Rincian | Keterangan |
| | PRIN- 281.SITA/PJ.052/2018 tanggal 25 Oktober 2018 | 1 | Fotokopi Akte Notaris ELLY RYSTAM, SH. Tanggal 14 Juli 2011 Nomor 008 tentang Pendirian Perseroran Terbatas PT. CHASANA GLOBAL MANDIRI | 1 set |
| | | 2 | Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan. | 1 lembar |
| | | 3 | Fotokopi NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar. | 3 lembar |
| | | 4 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan dari Kelurahan Kebon Bawang, Surat Keterangan Domisili Perusahaan. | 4 lembar |
| | | 5 | Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan dari KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok No. SP2DK-7071/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 30 April 2018 beserta lampiran | 3 lembar |
| 8. | | Penetapan Pengadilan Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Slt. Tanggal | | |
| | PRIN- 283.SITA/PJ.052/2018 tanggal 25 Oktober 2018 | No | Rincian | Keterangan |
| | | 1 | Fotokopi Print Screen transaksi Bank Mandiri dari rekening MARCHEL CHAN No. Rekening 1130011433855 ke rekening AMPERAWAN DAKOSTA nomor 9000021809521 | 3 lembar |
| | | 2 | Fotokopi Print Screen transaksi Bank Mandiri dari rekening PT KARIMATA ENERGI PERSADA No. | 2 lembar |

Hal. 18 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | Rekening 1130035678899 ke rekening AMPERAWAN DAKOSTA nomor 9000021809521 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------|------------|---|--|-----------------|---|---|-----------------|---|------------------------------|-----------------|---|---|-----------------|--|--|
| 9. | | Penetapan Pengadilan Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Slt. Tanggal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIN-285.SITA/PJ.052/2018 | <table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Fotokopi Faktur Pajak No.010.002.18.51974546</td><td>1 (satu) lembar</td></tr><tr><td>2</td><td>Fotokopi Invoice No. 182/INV-NTS/II/18</td><td>1 (satu) lembar</td></tr><tr><td>3</td><td>Fotokopi Receipt For Bunkers</td><td>1 (satu) lembar</td></tr><tr><td>4</td><td>Fotokopi SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Februari 2018, Surat Setoran Pajak PPN Masa Februari 2018 dan Bukti Penerimaan Elektronik tanggal 16 Oktober 2018</td><td>5 (lima) lembar</td></tr></table> | No | Rincian | Keterangan | 1 | Fotokopi Faktur Pajak No.010.002.18.51974546 | 1 (satu) lembar | 2 | Fotokopi Invoice No. 182/INV-NTS/II/18 | 1 (satu) lembar | 3 | Fotokopi Receipt For Bunkers | 1 (satu) lembar | 4 | Fotokopi SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Februari 2018, Surat Setoran Pajak PPN Masa Februari 2018 dan Bukti Penerimaan Elektronik tanggal 16 Oktober 2018 | 5 (lima) lembar | | |
| No | Rincian | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fotokopi Faktur Pajak No.010.002.18.51974546 | 1 (satu) lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fotokopi Invoice No. 182/INV-NTS/II/18 | 1 (satu) lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fotokopi Receipt For Bunkers | 1 (satu) lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Fotokopi SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Februari 2018, Surat Setoran Pajak PPN Masa Februari 2018 dan Bukti Penerimaan Elektronik tanggal 16 Oktober 2018 | 5 (lima) lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | Penetapan Pengadilan Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Slt. Tanggal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIN-287.SITA/PJ.052/2018 tanggal 26 oktober 2018 | <table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Print out formulir 1111 A2 (Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak) dan formulir 1111 B2 (Daftar Pajak Masukan yang dapat dikeditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri) atas nama PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA NPWP. 02.346.441.5-027.000 tahun 2017 dan 2018.</td><td>29 lembar</td></tr><tr><td>2</td><td>Print out formulir 1111 A2 (Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak) dan formulir 1111 B2 (Daftar Pajak Masukan yang dapat dikeditkan atas perolehan BKP/JKP dalam</td><td>6 lembar</td></tr></table> | No | Rincian | Keterangan | 1 | Print out formulir 1111 A2 (Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak) dan formulir 1111 B2 (Daftar Pajak Masukan yang dapat dikeditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri) atas nama PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA NPWP. 02.346.441.5-027.000 tahun 2017 dan 2018. | 29 lembar | 2 | Print out formulir 1111 A2 (Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak) dan formulir 1111 B2 (Daftar Pajak Masukan yang dapat dikeditkan atas perolehan BKP/JKP dalam | 6 lembar | | | | | | | | |
| No | Rincian | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Print out formulir 1111 A2 (Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak) dan formulir 1111 B2 (Daftar Pajak Masukan yang dapat dikeditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri) atas nama PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA NPWP. 02.346.441.5-027.000 tahun 2017 dan 2018. | 29 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Print out formulir 1111 A2 (Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak) dan formulir 1111 B2 (Daftar Pajak Masukan yang dapat dikeditkan atas perolehan BKP/JKP dalam | 6 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hal. 19 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--|--|---|------------|
| | | | negeri) atas nama PT. TRANS MARINE SEJATI NPWP. 75.713.134.7-003.000 tahun 2018. | |
| 11. | | Penetapan Pengadilan Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Slt. Tanggal | | |
| | PRIN-289.SITA/PJ.052/2018 | No | Rincian | Keterangan |
| | | 1 | Screenshot percakapan dengan ATENG dari aplikasi Whatsapp | 4 lembar |
| 12. | | Penetapan Pengadilan Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Slt. Tanggal | | |
| | PRIN-290.SITA/PJ.052/2018 tanggal 30 Oktober 2018 | No | Rincian | Keterangan |
| | | 1 | Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik DJP a.n. PT Trans Marine Sejati (TMS) | 1 lembar |
| | | 2 | Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik TMS | 1 lembar |
| | | 3 | Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak TMS | 1 lembar |
| | | 4 | Permintaan Sertifikat Elektronik TMS | 1 lembar |
| | | 5 | Surat Keterangan TMS | 1 lembar |
| | | 6 | Fotokopi KTP dan NPWP a.n. Ansar Yamin | 1 lembar |
| | | 7 | Fotokopi KTP, NPWP dan Kartu Keluarga a.n. Moh Maki | 2 lembar |
| | | 8 | Fotokopi SPT PPh Badan Tahun Pajak 2016 TMS | 1 Set |
| | | 9 | Fotokopi Akta No. 04 Tgl. 19 Desember 2017 TMS | 1 Set |
| | | 10 | Fotokopi Akta Pendirian No. 70 Tgl. 18 Februari 2016 TMS | 1 Set |
| | | 11 | Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik DJP 2015 a.n. PT Nagasakti Trans Segara (NTS) | 1 lembar |
| | | 12 | Permintaan Sertifikat Elektronik 2015 NTS | 1 lembar |

Hal. 20 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



| | | | | |
|--|--|----|---|----------|
| | | 13 | Pemberitahuan Kode Aktivasi NTS | 1 lembar |
| | | 14 | Permohonan Kode Aktivasi NTS | 1 lembar |
| | | 15 | Fotokopi KTP, NPWP dan Kartu Keluarga a.n. Yohanes Agus Santosa | 2 lembar |
| | | 16 | Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan NTS | 1 lembar |
| | | 17 | Fotokopi Surat Keterangan Ditjen Perhubungan Laut NTS | 1 lembar |
| | | 18 | Fotokopi SIUP Kecil NTS | 1 lembar |
| | | 19 | Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan NTS | 1 lembar |
| | | 20 | Fotokopi API- Produsen NTS | 1 lembar |
| | | 21 | Fotokopi Akta No. 05 Tgl. 18 November 2014 NTS | 1 Set |
| | | 22 | Fotokopi Akta No. 03 Tgl. 16 Mei 2014 NTS | 1 Set |
| | | 23 | Fotokopi SPT PPh Badan Tahun Pajak 2014 NTS | 1 Set |
| | | 24 | Permintaan Sertifikat Elektronik 2017 NTS | 1 lembar |
| | | 25 | Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik DJP 2017 NTS | 1 lembar |
| | | 26 | Permintaan Pencabutan Sertifikat Elektronik 2017 NTS | 1 lembar |
| | | 27 | Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik 2017 NTS | 1 lembar |
| | | 28 | Fotokopi Berwarna KTP, NPWP dan Kartu Keluarga a.n. Yohanes Agus Santosa | 2 lembar |
| | | 29 | Fotokopi Akta No. 02 Tgl. 13 Februari 2017 NTS | 1 Set |
| | | 30 | SPT PPh Badan Tahun Pajak 2016 Normal & Pembetulan ke-1 NTS | 2 Set |
| | | 31 | SPT PPN Masa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober dan November 2016 NTS | 10 Set |
| | | 32 | SPT PPN Masa Januari, Februari, | 9 Set |



| | | Maret, April, Juni, Agustus, September, Oktober dan November 2017 NTS | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----|---------|------------|---|---|-----------|---|---|----------|--|
| 13. | | Penetapan Pengadilan Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Slt. Tanggal | | | | | | | | | | |
| | PRIN-292.SITA/PJ.052/2018 tanggal 30 Oktober 2018 | <table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nagasaki Trans Segara Nomor 2 Tanggal 26 Desember 2003 Notaris ABDUL RASYID LATUAMURY, SH.</td><td>18 lembar</td></tr><tr><td>2</td><td>Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nagasaki Trans Segara Nomor 04 Tanggal 11 Oktober 2017 Notaris ABDUL SALAM, SH.</td><td>8 lembar</td></tr></table> | No | Rincian | Keterangan | 1 | Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nagasaki Trans Segara Nomor 2 Tanggal 26 Desember 2003 Notaris ABDUL RASYID LATUAMURY, SH. | 18 lembar | 2 | Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nagasaki Trans Segara Nomor 04 Tanggal 11 Oktober 2017 Notaris ABDUL SALAM, SH. | 8 lembar | |
| No | Rincian | Keterangan | | | | | | | | | | |
| 1 | Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nagasaki Trans Segara Nomor 2 Tanggal 26 Desember 2003 Notaris ABDUL RASYID LATUAMURY, SH. | 18 lembar | | | | | | | | | | |
| 2 | Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nagasaki Trans Segara Nomor 04 Tanggal 11 Oktober 2017 Notaris ABDUL SALAM, SH. | 8 lembar | | | | | | | | | | |
| 14. | | Penetapan Pengadilan Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Slt. Tanggal | | | | | | | | | | |
| | PRIN-295.SITA/PJ.052/2018 tanggal 30 Oktober 2018 | <table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Fotokopi Printscren Mbanking Bank BCA ke rekening BCA nomor 4141637317 atas nama ANSAR YAMIN</td><td>4 lembar</td></tr><tr><td>2</td><td>Fotokopi Print Screen transaksi Bank Mandiri dari rekening PUJI RAHAYU NO. Rekening 1010004196638 ke rekening PT NAGASAKTI TRANS SEGARA nomor 1230003389899</td><td>3 lembar</td></tr></table> | No | Rincian | Keterangan | 1 | Fotokopi Printscren Mbanking Bank BCA ke rekening BCA nomor 4141637317 atas nama ANSAR YAMIN | 4 lembar | 2 | Fotokopi Print Screen transaksi Bank Mandiri dari rekening PUJI RAHAYU NO. Rekening 1010004196638 ke rekening PT NAGASAKTI TRANS SEGARA nomor 1230003389899 | 3 lembar | |
| No | Rincian | Keterangan | | | | | | | | | | |
| 1 | Fotokopi Printscren Mbanking Bank BCA ke rekening BCA nomor 4141637317 atas nama ANSAR YAMIN | 4 lembar | | | | | | | | | | |
| 2 | Fotokopi Print Screen transaksi Bank Mandiri dari rekening PUJI RAHAYU NO. Rekening 1010004196638 ke rekening PT NAGASAKTI TRANS SEGARA nomor 1230003389899 | 3 lembar | | | | | | | | | | |

Surat-surat mulai dari Nomor urut : 1 sampai dengan Nomor urut : 22 tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Hal. 22 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2020 Nomor 702/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tersebut Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 11 Maret 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 35/AKTA.PID/2020/PN.Jkt.Utr. yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI SETYO KUNCORO, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Maret 2020 Nomor 702/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 9 Maret 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 35/AKTA.PID/2020/PN.Jkt.Utr. yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI SETYO KUNCORO, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor W10-U4/5825/HK.01./07/2020. tanggal 7 JULI 2020 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 235/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. dalam waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara aquo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Maret 2020 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan ketika Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Maret 2020, dan Penuntut Umum mengajukan permintaaan banding pada tanggal 11 Maret 2020 dan mencermati pula bunyi ketentuan Pasal 233 KUHAP serta segala formalitas sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal dapat diterima;

Hal. 23 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANSAR YAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANSAR YAMIN selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan.
3. Membayar denda sebesar 2 x Rp. 1.552.674.048,- (Satu milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) = Rp. 3.105.348.096,- (tiga milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.
Uang titipan sebesar Rp. 953.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda (sebagaimana berita acara penitipan uang pembayaran pidana) tanggal 6 Mei 2019).
4. Menyatakan barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 24 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa ANSAR YAMIN tersebut ;
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Maret 2020 Nomor 702/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa ANSAR YAMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Pemohon Banding / Terdakwa ANSAR YAMIN dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
3. Memulihkan nama baik Pemohon Banding / Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat.
4. Membebaskan Pemohon Banding / Terdakwa ANSAR YAMIN dari pembayaran pajak senilai Rp. 1.552.674.048,- (Satu milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) karena Terdakwa ANSAR YAMIN sudah membayar lunas pada tanggal 6 Mei 2019. (Pembetulan Pajak).
5. Menyatakan uang sebesar Rp. 953.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) adalah bukti pelunasan pembayaran pajak pada tanggal 6 Mei 2019, berdasarkan bukti penitipan uang yang langsung di transfer ke kas Negara ;
6. Membebaskan Pemohon Banding / Terdakwa ANSAR YAMIN dari denda sebesar Rp. 3.105.348.096,- (tiga milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu Sembilan puluh enam rupiah).
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau :

Kami selaku Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim,

Hal. 25 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa ANSAR YAMIN tersebut ;
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Maret 2020 Nomor 702/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa ANSAR YAMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Pemohon Banding / Terdakwa ANSAR YAMIN dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
3. Memulihkan nama baik Pemohon Banding / Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat.
4. Membebaskan Pemohon Banding / Terdakwa ANSAR YAMIN dari pembayaran pajak senilai Rp. 1.552.674.048,- (Satu milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) karena Terdakwa ANSAR YAMIN sudah membayar lunas pada tanggal 6 Mei 2019. (Pembetulan Pajak).
5. Menyatakan uang sebesar Rp. 953.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) adalah bukti pelunasan pembayaran pajak pada

Hal. 26 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2019, berdasarkan bukti penitipan uang yang langsung di transfer ke kas Negara ;

6. Membebaskan Pemohon Banding / Terdakwa ANSAR YAMIN dari denda sebesar Rp. 3.105.348.096,- (tiga milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu Sembilan puluh enam rupiah).

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau :

Kami selaku Terbanding / Terdakwa ANSAR YAMIN mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran mareil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Memperhatikan Memori Banding Dari Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dan Kontra Banding tersebut hanya bersifat penjelasan dan pengulangan, oleh karenanya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Maret 2020 Nomor 702/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, maka dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang-barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan kesatu Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun

Hal. 27 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal atas dirinya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut”, karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Maret 2020 Nomor 702/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP **dan** Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 28 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Maret 2020 Nomor 702/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., yang dimintakan banding tersebut;
3. **Membebani** Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 13 Agustus 2020** oleh kami **H. Edwarman, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.**, dan **Hi. A. Sanwari, HA., S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 330/PID/2020/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 2 September 2020** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Inna Iskantriana, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.

H. Edwarman, S.H.

Hi. A. Sanwari, HA., S.H.,M.H.

Hal. 29 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Inna Iskantriana.,S.H.,M.H.

Hal. 30 Put.No.330/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)